



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2023

RENCANA
KERJA





GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/258/2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
 - r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
 - t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
 - u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
 - aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
 - cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

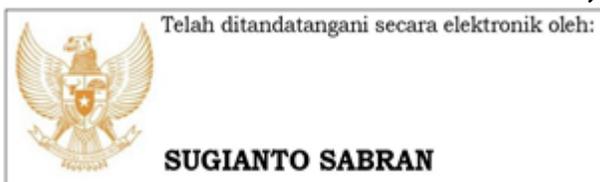
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya;
- kk. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- tt. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk diketahui

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-20
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD	III-6
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	II-18
Tabel 2.3	Review Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	II-21
Tabel 2.4	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	II-34
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah	III-9
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023	IV-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menindaklanjuti RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 serta Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka selanjutnya Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode tahunan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada Renstra PD, serta memuat program-program pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Renja PD merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi tahun 2021-2026 yaitu “

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok,
Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

serta Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, RENJA PD mempunyai kedudukan yang strategis, karena RENJA PD menterjemahkan perencanaan strategis

jangka menengah (RPJMD) dan Renstra PD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA PD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rentsra PD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan anggaran yang termuat dalam RKA- SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA PD, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 TentangKlasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adanya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan :

Menetapkan rumusan program dan kegiatan pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun 2023 sebagai acuan bagi Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RENJA-PD Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (N-1)

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Dalam tatanan dokumen perencanaan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis. Tercapaitidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) tahun N-2. Terkait dengan hal tersebut, RENJA-PD Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021.

Tahun 2021 Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pagu anggaran dengan total sebesar Rp. 36.703 Milyar lebih. Adapun realisasi anggaran pada akhir tahun 2021 mampu mencapai realisasi yang sangat baik yakni sebesar Rp. 33.799 Milyar lebih atau mencapai 92,09%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 Program dan 14 kegiatan. Dari jumlah program dan kegiatan tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Program rutin kantor

Terdiri dari 1 program dan 6 kegiatan, dengan jumlah anggaran Rp.10.300 Milyar lebih. Realisasi anggaran program dan kegiatan yang menunjang pencapaian strategis pada akhir tahun 2021 sebesar Rp.9.331 Milyar lebih (90,59%).

Keseluruhan program dan kegiatan yang bersifat rutin mampu mencapai target kinerja yang optimal (100%), walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai serapan anggaran yang tinggi, namun sasaran kinerjanya sudah tercapai.

2. Program strategis

Terdiri dari 6 program dan 8 kegiatan, dengan jumlah anggaran Rp.26.403 Milyar lebih. Realisasi anggaran program dan kegiatan yang menunjang pencapaian strategis pada akhir tahun 2021 sebesar Rp. 24.468 Milyar lebih (92,67%).

Adapun program-program strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan, dengan pagu Rp.217,35 Juta lebih, realisasi 99,99%.
- b. Program Kawasan Permukiman, dengan pagu Rp.647,93 Juta lebih, realisasi 99,89%.
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman, dengan pagu Rp. 25,104 Milyar lebih, realisasi 92,31%.
- d. Program Pengelolaan Izin Lokasi, dengan pagu Rp.158,08 Juta lebih, realisasi 99,42%.
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan pagu Rp.140 Juta, realisasi 99,60%.
- f. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, dengan pagu Rp.135,27 Juta lebih , realisasi 99,35%.

Secara rinci, hasil evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 untuk Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	04	01															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
1	04	01	1,01														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1	04	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
1	04	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
1	04	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
1	04	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	100	5	5	100%	20	20	100%	25	25%
1	04	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	2700	300	300	100%	600	600	100%	900	33%
1	04	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	150000	21900	21900	100%	30.000	30000	100%	51900	35%
1	04	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun									
1	04	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
1	04	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase gedung kantor atau bangunan yang terbangun									
1	04	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	2500	500	500	100%	500	500	100%	1000	40%
1	04	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
1	04	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	30	6	6	100%	6	6	100%	12	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	20	4	4	100%	4	4	100%	8	40%
1	04	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
1	04	02	1,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi							
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)					
1	04	02	1,01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni		Dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
1	04	03	1,01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
1	04	03	1,01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Persentase terselenggaranya penyediaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha		Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha selama 1 tahun	5	1	0	0%	1	1	100%	1	20%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	03	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Peremukimian Kembali Peremukimian kumuh	Persentase terselenggaranya penyediaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha		Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha selama 1 tahun	5	1	0	0%	1	1	100%	1	20%
1	04	03	1,01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase terselenggaranya penyediaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha		Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	03	1,01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha		Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha selama 1 tahun	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	03	1,02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	03	1,02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase terselenggaranya a penyediaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Perbaikan RTLH	660	1	0	0%	90	54	60%	54	8%
1	04	03	1,02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase terselenggaranya a penyediaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani		5	1	0	0%	1	1	100%	1	20%
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
1	04	05	1,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman												
1	04	05	1,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase terselenggaranya a penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman yang berkondisi baik	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	05	1,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman		Jumlah panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman yang berkondisi baik	26800	18000	18000	100%	3.300	3300	100%	21300	79%
1	04	05	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman		Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	04	06	1,01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi						
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)				
1	04	06	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi		Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat Sertifikasi dan Registrasi tingkat kemampuan menengah	100	40	40	100%	20	20	100%	60	60%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN												
2	10	04	1,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
2	10	04	1,01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan layanan koordinasi penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen data penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE												
2	10	06	1,01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
2	10	06	1,01	01	Inventarisasi Subjek dan Obyek Redistribusi Tanah	Cakupan layanan koordinasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Dokumen Inventarisasi Subjek dan Obyek Redistribusi Tanah	Data subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja Capaian Program pada tahun akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja s/d 2021			Capaian Kinerja 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan 2022
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi	Target Renja	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi		
1	2	3			4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (9/8)	11 (6+9)	12 (11/4)
2 10 06 1,01 02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan koordinasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%
2 10 06 1,01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan koordinasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Data subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5	1	1	100%	1	1	100%	2	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan nomenklaturnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan. Dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, Disperkimtan mendapatkan mandat untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan sebagaimana yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permen PU nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar pelayanan minimal Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. SPM bidang perumahan ini terkait denganfasilitasi kebijakan perumahan terhadap bencana dan kebijakan pembanguna yang mengakibatkan relokasi.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan termuat dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil
1.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumahlayak huni
		b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaanrumah yang layak huni
		c. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani
		d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
2.	Pertanahan	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yangditerbitkan
		b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesaitepat waktu
		c. Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentangPemerintahan Daerah. Pengukuran Kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan

indikator masing- masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Dalam pelaksanaan tupoksi dan kewenangannya maka capaian kinerja Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Indikator 100% pada SPM dicapai pada tahapan perencanaan SPM (kegiatan sosialisasi dan pendataan) karena indikator kegiatan secara nyata baik bencana maupun kebijakan yang mengakibatkan relokasi belum ada)</i>
	b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	c. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	-	√	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	<i>Tahun 2021-2022 tidak ada penanganan kawasan kumuh</i>
	d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	-	√	100%	100%	100%	100%	TAD	100%	100%	100%	<i>Di hitung relatif terhadap kondisi umum Kalimantan Tengah</i>
2	Pertanahan											
	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	√	100%	100%	100%	100%	98,5 3%	100%	100%	100%	<i>Hasil pendataan bidang pertanahan</i>
	b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Hasil pendataan bidang pertanahan</i>
	c. Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	-	√	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	<i>Hasil pendataan bidang pertanahan</i>

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada awal 2021 Gubernur Kalimantan Tengah bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah akan menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2021, dengan sasaran strategis yang diselaraskan dengan pencapaian target renstra dan RPJMD. Sampai dengan akhir tahun 2021, telah cukup banyak hasil pencapaian dalam lingkup urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Di bidang PKP, melalui Peningkatan kualitas PSU lingkungan permukiman, Disperkimtan menyelenggarakan peningkatan jalan dan drainase lingkungan sebagai program strategis. Namun dengan adanya realokasi anggaran pada tahun 2021 sebagai akibat pandemi Covid-19, maka program dibidang PKP tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Program ini memberikan multi efek bagi pencapaian target sektor lain diluar sektor PKP, misalnya mendukung pencapaian target kesehatan dan sanitasi lingkungan.

Di bidang pertanahan, koordinasi dan sinkronisasi baik dengan instansi pusat maupun kabupaten kota telah cukup baik, namun tentunya akan terus di tingkatkan seiring dengan semakin banyak dan luasnya pelimpahan kewenangan urusan pertanahan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

Menilik perkembangan kondisi yang ada terhitung sejak tahun 2020 maka beberapa isu penting yang menjadi perhatian Disperkimtan ke depan terkait dengan aspek kewenangan, kebutuhan organisasi dan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah:

1. Pemantapan pelaksanaan SPM bidang perumahan melalui dukungan perangkat terkait berupa data, organisasi, sumber daya dan peraturan pendukung pelaksanaan;

2. Koordinasi dan pematapan penyusunan serta legalisasi RP3KP sebagai landasan hukum pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Terkait dengan penyempurnaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka perlu optimalisasi kewenangan dalam bidang permukiman, termasuk pengelolaan kawasan kumuh 10-15 Ha terkait dengan kontribusi penyediaan rumah layak huni.
4. Secara bertahap memantapkan implementasi 9 (sembilan) kewenangan bidang pertanahan sesuai kebutuhan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses perencanaan seringkali mengalami berbagai macam dinamika yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap aspek-aspek perencanaan itu sendiri. Sesuai dengan nomenklturnya, maka rancangan awal RKPD adalah inisiasi tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang masih cenderung bersifat indikatif.

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan. Makajika mempertimbangkan aspek dinamika yang terjadi sebagai akibat perubahan asumsi perencanaan, maka perlu dilakukan telaahan antara kebutuhan dari perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut. Berikut adalah hasil analisis Renja-PD Disperkimtan Tahun 2023 terhadap rancangan awal RPKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Review Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n		Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			220.000.000				260.000.000					
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	150.000.000	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	150.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	35.000.000	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	60.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	35.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	50.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.068.307.227				5.483.353.136					
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	1 tahun	39 Orang/ Bulan	1 tahun	5.047.307.227	1 tahun	39 Orang/ Bulan	1 tahun	5.448.353.136	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	21.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	35.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							116.000.000				230.000.000	
-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	100.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	200.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	16.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	30.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							39.000.000				190.000.000	
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	10.000.000	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	20.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	9.000.000	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	20.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	2 Orang	1 tahun	20.000.000	1 tahun	2 Orang	1 tahun	150.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah							982.707.033				1.948.184.451	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Paket	1 tahun	48.000.000	1 tahun	1 Paket	1 tahun	60.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Paket	1 tahun	367.707.033	1 tahun	1 Paket	1 tahun	997.759.633	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Paket	1 tahun	50.000.000	1 tahun	1 Paket	1 tahun	70.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	50.000.000	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	100.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	367.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	620.424.818	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	100.000.000	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	100.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							300.000.000				0	
-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase gedung kantor atau bangunan yang terbangun	1 tahun	2 Unit	100 %	300.000.000	-	-	-	0	Tidak Sesuai Rancangan

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan											Akhir RKPD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.332.000.000				4.083.000.000	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	7.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	10.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	625.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	675.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	3.700.000.000	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	3.398.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							644.000.000				1.505.500.000	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	1 tahun	5 Unit	1 tahun	254.000.000	1 tahun	5 Unit	1 tahun	300.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	1 tahun	5 Unit	1 tahun	200.000.000	1 tahun	5 Unit	1 tahun	455.500.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Unit	1 tahun	100.000.000	1 tahun	1 Unit	1 tahun	550.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		bidang PKP dan Pertanahan											
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 Unit	1 tahun	90.000.000	1 tahun	1 Unit	1 tahun	200.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							300.000.000				760.140.000	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							300.000.000				526.355.000	
-	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang berpotensi terkena relokasi program provinsi	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 %	1 Dokumen	1 Keg	300.000.000	100 %	1 Dokumen	1 Keg	223.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	-	-	100 %	1 Dokumen	3 keg	163.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n		Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n		
		daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni											
-	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	-	-	100 %	1 Dokumen	3 keg	138.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							0				233.785.000	
-	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang terehabilitasi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	-	-	100 %	6 Unit Rumah	1 Keg	233.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Progra m	Keluara n Sub Kegiatan n	Hasil Kegiatan n		Progr am	Keluara n Sub Kegiatan n	Hasil Kegiatan n		
		penyediaan rumah layak huni											
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							6.703.575.380				5.871.271.056	
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							920.500.000				1.490.483.856	
-	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata ; Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Kawasan ; 125 Unit	1 Laporan	4 Keg	270.500.000	1 Kawasan ; 85 Unit	1 Laporan	4 Keg	173.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata ; Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Kawasan ; 125 Unit	1 Laporan	4 Keg	100.000.000	1 Kawasan ; 85 Unit	1 Laporan	4 Keg	78.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata ; Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Dokumen Kebijakan PKP yang tersusun/ tereview/ terlegalisasi	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Kawasan ; 125 Unit	1 Dokumen	4 Keg	300.000.000	1 Kawasan ; 85 Unit	1 Dokumen	4 Keg	852.128.856	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata ; Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10	2 Kawasan ; 125 Unit	1 Laporan	4 Keg	250.000.000	1 Kawasan ; 85 Unit	1 Laporan	4 Keg	385.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n		Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n		
				(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							5.783.075.380				4.380.787.200	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata ; Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Kawasa n ; 125 Unit	1 Laporan	3 Keg	100.000.000	1 Kawas an ; 85 Unit	1 Laporan	3 Keg	123.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata ; Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Kawasa n ; 125 Unit	125 Unit	3 Keg	4.683.075.380	1 Kawas an ; 85 Unit	125 Unit	3 Keg	3.091.828.400	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
-	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata ; Jumlah Perbaikan RTLH	Luas Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang diremajakan/ dipugar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Kawasan ; 125 Unit	2 Ha	3 Keg	1.000.000.000	1 Kawasan ; 85 Unit	2 Ha	3 Keg	1.165.173.800	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							17.000.000.000				105.060.057.770	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman							17.000.000.000				105.060.057.770	
-	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang terlaksana	100 %	1 Dokumen	3 Keg	575.000.000	100 %	1 Dokumen	3 Keg	3.949.177.200	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang terlaksana	100 %	10 Lokasi	3 Keg	16.275.000.000	100 %	10 Lokasi	3 Keg	100.610.880.570	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang terlaksana	100 %	1 Laporan	3 Keg	150.000.000	100 %	1 Laporan	3 Keg	500.000.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
E	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							200.000.000				173.785.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah				200.000.000				173.785.000				
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	100 %	1 Laporan	1 Keg	200.000.000	100 %	1 Laporan	1 Keg	173.785.000	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				566.610.000				786.537.510				
A.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				161.463.450				216.446.900				
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				161.463.450				216.446.900				
-	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	50%	1 Dokumen	1 Keg	161.463.450	50%	1 Dokumen	1 Keg	216.446.900	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
B.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				405.146.550				394.596.580				
1.	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				405.146.550				394.596.580				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
-	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat disertifikat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3000 Ha	1 Dokumen	3 Keg	120.514.050	-	-	-	0	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat disertifikat	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3000 Ha	1 Dokumen	3 Keg	135.494.000	3000 Ha	1 Dokumen	3 Keg	190.474.630	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat disertifikat	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3000 Ha	1 Berita Acara	3 Keg	149.138.500	3000 Ha	1 Berita Acara	3 Keg	204.121.950	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD
C.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							0				175.494.030	
1.	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi							0				175.494.030	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	1 Dok	1 Laporan	1 Keg	175.494.030	Tidak Sesuai Rancangan Akhir RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n		Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n		
				dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
								36.472.199.640				126.351.828.923	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Selain berpedoman pada Renstra, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah juga memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan. Telaah terhadap usulan masyarakat dilakukan secara bertahap, mulai dari penilaian teknis, kelayakan dan skala prioritas, serta kesesuaian kewenangan.

Dalam penyusunannya, program/kegiatan Disperkimtan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Proses sinkronisasi usulan dari kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan kebijakan nasional dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang ada, baik forum perangkat daerah, rakorterenbang, musrenbang provinsi, musrenbang nasional dan konreg kementerian teknis.

Selain itu juga menampung aspirasi berupa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang melalui berupa kajian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Berikut ini telaah terhadap usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan untuk Renja-PD tahun 2023 :

Tabel 2.4.
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
1	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Gang Palapa 1 Jalan Kaladan Buntok.	Jl. Kaladan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 M Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 M Anggaran : 0
2	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Gg. Bakti RT. 007 Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan.	Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
3	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Pembangunan Jalan Permukiman Baru Desa Sire.	Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
4	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Jalan Serunai Desa Tabak Kanilan.	Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
5	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jl. Pemabangunan RT. 002 s/d RT.008 Kelurahan Pendang.	Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
6	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Awon Kelurahan Buntok Kota Kawasan Kumuh.	Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
7	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Jl. Th Ahim Desa Tabak Kanilan.	Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
8	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Gang Seroja / Seroja I Ke Gang Seroja II dan Pembuatan Saluran Drenase RT. 07.	Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
9	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Mahajandau - Rangga Ilung.	Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
10	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Pelita RT. 14 Sampai Dengan Jalan Padat Karya Kelurahan Pendang.	Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
11	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Teluk Timbau RT.01 s/d RT. 04.	Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
12	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Penda Asam - Teluk Mampun.	Desa Penda Asam/ Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
13	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Gang AL-Hilal RT. 19 Kelurahan Hilir Sper.	Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
14	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Mengkatip (Jl. Kelurahan).	Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
15	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Desa Lembeng Bawah (Semenisasi).	Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
16	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Lanjutan Penyirangan, Pembangunan dan Cor Rabat Beton Jalan Barito Raya - Jembatan Bahalang.	Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
17	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Batampang RT.04 s/d RT.06.	Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
18	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Kartini Gang Bersama I Kelurahan Hilir Sper.	Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
19	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Wayun (Batas Desa Palu Rejo- Desa Wayun).	Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
20	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Karya Menuntung (Kelurahan Mengkatip- Damparan-Lehai).	Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
21	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Pembangunan Jalan Permukiman Konsolidasi Tanah BPN Desa Sababilah.	Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
22	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman dan Pembuatan Siring Gang Beringin I RT. 19.	Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 M Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 M Anggaran : 0
23	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Palu Rejo.	Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
24	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Pembangunan Jalan dari Jl. Pembangunan / Polsek Ke Jalan Kabupaten di Pendang.	Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
25	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Antar Desa Babai - Talio	Desa Babai / Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
26	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Mangkatip (Jl. Pembangunan - Jl. Mawar).	Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
27	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Gang Palapa II Jalan Kaladan RT. 14	Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
28	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Lanjutan Penyirangan, Pembangunan, dan Cor Beton Jalan Kelurahan Bangkuang.	Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
29	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan dan Jembatan Permukiman RT. 01 s/d RT. 04 Desa Ruhing Raya.	Desa Ruhing Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
30	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang AL-Fajar Jalan Kartini RT. 29	Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
31	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Pembangunan Baru Jalan Umpu Kakah Desa Sababilah.	Desa sababilah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
32	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Gang Tempe RT.12	Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 M Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 M Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
33	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Ruhing Raya RT. 04	Desa Ruhing Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
34	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Peningkatan Jalan Permukiman Gang Al-Hikmah Ruas Jalan H. Indar RT. 19.	Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
35	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Belum Fungsional jalan menuju Pemukiman Desa	Desa Janggi, Kecamatan Karau Kuala, Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung lainnya diantaranya Proposal, RAB, Titik Koordinat dll Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi lebih lanjut serta memperhatikan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
36	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Belum adanya akses jalan menuju Permukiman	Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung lainnya. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan di verivikasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
37	BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Tidak adanya akses jalan menuju Permukiman	Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan di verivikasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
38	BAPPEDA Kab. Barito Timur	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh - Kawasan Ampah Kota (terbatasnya alokasi anggaran untuk penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh)	Kecamatan Dusun Tengah, Kab. Barito Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diverifikasi lebih lanjut dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
39	BAPPEDA Kab. Barito Timur	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh - Kawasan Dusun Timur (terbatasnya alokasi anggaran untuk penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh)	Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diverifikasi lebih lanjut dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
40	BAPPEDA Kab. Barito Timur	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (terbatasnya alokasi anggaran untuk penanganan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni)	Kecamatan Dusun Tengah, Kab. Barito Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
41	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10=15 Ha	Kecamatan Montallat, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : 1.Proposal/Studi Kelayakan (FS) 2.Detail Engineering Design (DED) 3.Readiness Criteria (RC) 4.Kesiapan Lahan (Sertifikat) 5.AMDAL/UKL/UPL 6.Dokumentasi Eksisting 7.Mencantumkan titik koordinat lokasi 8.dan lainnya Koefisien : 0 - Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan masuk dalam kewenangan provinsi, akan diverifikasi dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran dan prioritas daerah Koefisien : 0 - Anggaran : 0
42	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10=15 Ha	Kecamatan Teweh Selatan, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : 1.Proposal/Studi Kelayakan (FS) 2.Detail Engineering Design (DED) 3.Readiness Criteria (RC) 4.Kesiapan Lahan (Sertifikat) 5.AMDAL/UKL/UPL 6.Dokumentasi Eksisting 7.Mencantumkan titik koordinat lokasi 8.dan lainnya Koefisien : 0 - Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan masuk dalam kewenangan provinsi, akan diverifikasi dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran dan prioritas daerah Koefisien : 0 - Anggaran : 0
43	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Pembangunan Drainase Perkotaan Kota Lahei	Kec. Lahei, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
44	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Pembangunan Drainase Perkotaan Kota MUara Teweh	Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
45	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Pembangunan Drainase Kelurahan jambu	Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
46	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Pembangunan Drainase Desa Kandui	Kec. Gunung Timang, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
47	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Pembangunan Drainase Desa Benangin	Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
48	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Pembangunan Drainase Desa Lampeong	Kec. Gunung Purei, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
49	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Pembangunan Drainase Kelurahan Lanjas	Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
50	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Rehab rumah tidak layak huni di kawasan kumuh 10-15 Ha 18 unit di RT.09 Kelurahan Lanjas Kecamatan teweh tengah	Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah RT. 09, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: SK Kumuh (update), Proposal, Foto Rumah dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
51	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Rehab rumah tidak layak huni di kawasan kumuh 10-15 Ha 14 unit Desa Trinsing	Desa Trinsing, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: SK Kumuh (update), Proposal, Foto Rumah dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
52	BAPPEDA Kab. Barito Utara	Rehab rumah tidak layak huni di kawasan kumuh 10-15 Ha 6 unit di RT. 03 Kelurahan Montallat II Kecamatan Montallat	Kelurahan Montallat II Kecamatan Montallat RT. 03 dan 04, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: SK Kumuh (update), Proposal, Foto Rumah dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
53	BAPPEDA Kab. Gunung Mas	Masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas sebanyak 30 Unit.	Kelurahan Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung antara lain: Data BNBA, SK Kumuh, input pd aplikasi e-RTLH dll. Nomenklatur Usulan kegiatan agar diperbaiki/diperjelas Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
54	BAPPEDA Kab. Gunung Mas	Masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kelurahan Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas sebanyak 30 unit	Kelurahan Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: SK Kumuh (update), Proposal, Foto Rumah dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
55	BAPPEDA Kab. Kapuas	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Bentuk Jaya / Kecamatan Dadahup 100 paket, kami Telah melakukan pendataan dan verifikasi data terhadap lokasi. estimasi anggaran Rp 5.000.000.000	Desa Bentuk Jaya / Kecamatan Dadahup, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
56	BAPPEDA Kab. Kapuas	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Dadahup / Kecamatan Dadahup 200 Paket, kami Telah melakukan pendataan dan verifikasi data terhadap lokasi. Estimasi anggaran Rp 10.000.000.000	Desa Dadahup / Kecamatan Dadahup, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
57	BAPPEDA Kab. Kapuas	Bantuan Stimulan Perumahan Swadayadi Desa Pulau Telo Baru / Kecamatan Selat 111 Paket, kamiTelah melakukan pendataan dan verifikasi data terhadap lokasi. Estimasi Anggaran Rp 5.550.000.000	Desa Pulau Telo Baru / Kecamatan Selat, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
58	BAPPEDA Kab. Kapuas	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Selat Dalam 100 Paket, Selat Tengah 100 Paket, dan Desa Pulau Telo Lama 50 Paket/ Kecamatan Selat, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial siap dilakukan verifikasi. Estimasi anggaran Rp 12.500.000.000	Kecamatan Selat, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan dan Lokasi Kelurahan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
59	BAPPEDA Kab. Kapuas	Meningkatnya masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kapuas terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai. Perumahan Griya Sederhana Desa Pulau Telo Baru / Kecamatan Selat 1 Paket Rp 5.000.000.000	Perum Griya sederhana/ Desa Pulau Telo Baru, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung. Nomenklatur usulan kegiatan agar diperbaiki/diperjelas Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diverivikasi lebih lanjut dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
60	BAPPEDA Kab. Katingan	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mufakat dan Jl. Matseh Matyasin ,Desa Samba Bakumpai	Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kab. Katingan	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: Proposal, Dokumentasi Eksisting dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
61	BAPPEDA Kab. Katingan	Perlunya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. Mufakat , Desa Samba Bakumpai	Desa Samba Bakumpai, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: Proposal, Dokumentasi Eksisting dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
62	BAPPEDA Kab. Katingan	Perlunya Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Matseh Matyasin, Desa Samba Bakumpai	Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kab. Katingan	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: Proposal, Dokumentasi Eksisting dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
63	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Sabilur Rosyad	RT.02 Kel. Mendawai Seberang Kec Arsel, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
64	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	Peningkatan Jalan Lingkungan Volume 1 Paket	Desa Sungai Kapitan Kec Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Lengkapi data dukung dan dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
65	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Perumahan Wengga Agung Jalur 2-14 di Kelurahan Baamang Barat, 2.865 Meter	Jalan Wengga Agung Jalur 2-14 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan, dengan catatan agar dilengkapi data pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
66	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Perumahan Pandawa Raya di Kelurahan Pasir Putih 2.930 Meter	Komplek Perumahan Pandawa Raya Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
67	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Perumahan Pengaringan Permai 500 Meter	Komplek Perumahan Pengaringan Permai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
68	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan Wengga Metropolitan di Kelurahan Baamang Barat 30.000 M2	Komplek Perumahan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
69	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan Bukit Raya di Kelurahan Baamang Barat 10.000 M2	Jalan Bukit Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
70	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Drainase Jalan Bukit Raya di Kelurahan Baamang Barat 10.000 M	Jalan Bukit Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
71	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan Metro Sawit di Kelurahan Baamang Barat 1.200 M	Jalan Metro Sawit Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
72	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan Mentaya Raya tembus Jalan Metro Sawit di Kelurahan Baamang Barat 4.800 M	Jalan Mentaya Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
73	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Box Culvert Jalan Bukit Raya di Kelurahan Baamang Barat 10 M	Jalan Bukit Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
74	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Siring Komplek Bukit Raya di Kelurahan Baamang Barat 70 M	Komplek Bukit Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
75	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Box Culvert Jalan Wengga 7 di Kelurahan Baamang Barat 80 M2	Jalan Wengga 7 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
76	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan Bumi Raya 3 di Kelurahan Baamang Barat 100 M2	Jalan Bumi Raya 3 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
77	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 15 RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 600 M2	Jalan Gunung Arjuno 15 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
78	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 15A RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 120 M2	Jalan Gunung Arjuno 15A Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
79	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 15B RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 600 M2	Jalan Gunung Arjuno 15B Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
80	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 12A RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 480 M2	Jalan Gunung Arjuno 12A Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
81	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 12B RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 424 M2	Jalan Gunung Arjuno 12B Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
82	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Pembuatan Gorong-Gorong Beton Jalan Gunung Arjuno 12B RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 2 Unit	Jalan Gunung Arjuno 12B Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
83	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Perumahan Wengga Agung Jalur 2-14 di Kelurahan Baamang Barat, 2.252 Meter"	"Jalan Wengga Agung Jalur 2-6, 8, 10-14 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
84	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Perumahan Pandawa Raya di Kelurahan Mentawa Baru Hulu 424 Meter	"Komplek Perumahan Pandawa Raya Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
85	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan H. Syahriansyah Komplek Perumahan Aryaga di Kelurahan Sawahan 390 Meter"	"Komplek Perumahan Aryaga Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
86	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan Wengga Metropolitan di Kelurahan Baamang Barat 3.811 M2"	"Komplek Perumahan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
87	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan Bukit Raya di Kelurahan Baamang Barat 990 M2"	"Jalan Bukit Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
88	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Pembangunan Drainase Jalan Bukit Raya di Kelurahan Baamang Barat 990 M2"	"Jalan Bukit Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
89	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan Metro Sawit di Kelurahan Baamang Barat 1.050 M2"	"Jalan Metro Sawit Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
90	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan Mentaya Raya tembus Jalan Metro Sawit di Kelurahan Baamang Barat 2.058 M2"	"Jalan Mentaya Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
91	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Pembangunan Box Culvert Jalan Bukit Raya di Kelurahan Baamang Barat 9 M2"	"Jalan Bukit Raya Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
92	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Pembangunan Box Culvert Jalan Wengga 7 di Kelurahan Baamang Barat 12 M2"	"Jalan Wengga 7 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
93	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan Bumi Raya 3 di Kelurahan Baamang Barat 10.500 M2"	"Jalan Bumi Raya 3 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
94	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Peningkatan Jalan Bumi Raya 2 di Kelurahan Baamang Barat 4.800 M2"	"Jalan Bumi Raya 3 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
95	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 15 RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 745 M2"	"Jalan Gunung Arjuno 15 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
96	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 15A RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 140 M2"	"Jalan Gunung Arjuno 15A Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
97	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 15B RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 150 M2"	"Jalan Gunung Arjuno 15B Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
98	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 12A RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 660 M2"	"Jalan Gunung Arjuno 12A Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
99	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Semenisasi Jalan Gunung Arjuno 12B RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 700 M2"	"Jalan Gunung Arjuno 12B Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
100	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Pembuatan Gorong-Gorong Beton Jalan Gunung Arjuno 12B RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 1 Unit"	"Jalan Gunung Arjuno 12B Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
101	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	"Pembuatan Gorong-Gorong Beton Jalan Gunung Arjuno 14 RT 47/08 di Kelurahan Baamang Tengah 1 Unit"	"Jalan Gunung Arjuno 14 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang", Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
102	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Baamang 30 Unit Rp 900.000.000,00	Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: SK Kumuh (update), Proposal, Foto Rumah dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0
103	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Gaharu Komplek SMKN 2 Nanga Bulik	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
104	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pulai Komplek SMKN 2 Nanga Bulik	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
105	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Seroja	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
106	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Teratai	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
107	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Melati I	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
108	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Melati IV dan Jalan Anggrek	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
109	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Mawar dan Jalan Kamboja	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
110	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Meranti Komplek SMKN 2 Nanga Bulik	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
111	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan H. Rudi	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
112	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lada	Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
113	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bunut	Desa Sungai Mentawa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
114	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Sei Mentawa	Desa Sungai Mentawa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
115	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Batu Kotam	Desa Batu Kotam, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
116	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Bina Bhakti	Desa Bina Bhakti, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
117	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan tri Tunggal	Desa Bina Bhakti, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
118	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Jangkar Prima	Desa Jangkar Prima, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
119	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Mekar Mulya	Desa Mekar Mulya, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
120	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Bukit Harum	Desa Bukit Harum, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
					prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
121	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Modang Mas	Desa Modang Mas, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
122	BAPPEDA Kab. Lamandau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Mukti Manunggal	Desa Mukti Manunggal, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau	Rekomendasi : Tetap memperhatikan dan menyesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
123	BAPPEDA Kab. Murung Raya	Pembangunan / Peningkatan Jalan lingkungan dan Drainase Jl. Bukit Kasturi	desa Danau Usung Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
124	BAPPEDA Kab. Murung Raya	Pembangunan Drainase dan Turap jalan Lingkungan MIN Beriwit	Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
125	BAPPEDA Kab. Murung Raya	pembangunan dan peningkatan Badan Jalan Lingkungan Jln Bina Marga rt 05 Desa Danau Usung	Desa Danau Usung Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
126	BAPPEDA Kab. Murung Raya	jalan lingkungan kurang memadai untuk di lewati di Jalan Pulau landan I Gang I	Jl Pulau landan I gang Landan I Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung. Nomenklatur usulan kegiatan agar diperbaiki. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
127	BAPPEDA Kab. Murung Raya	Peningkatan Jalan Lingkungan jl. arjuna 1, Perumahan Arjuna Blok A dan Blok B	Jl. Arjuna Kel Beriwit Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
128	BAPPEDA Kab. Murung Raya	Peningkatan Jalan Lingkungan Dalam Kota (pengaspalan)	kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
129	BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Dibutuhkan peningkatan kualitas rumah warga masyarakat berpenghasilan rendah / pra sejahtera total anggaran Sebanyak Rp 4.125.000.000,-	Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung. Perlu diperjelas apakah usulan terkait PSU atau perbaikan RTLH? Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Jika usulan terkait perbaikan RTLH, maka akan diproses lebih lanjut untuk yang berada pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
130	BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Kurangnya dukungan PSU pada Kawasan Permukiman untuk mendukung Permukiman yang layak dengan total Rp. 8.131.200.000 ,-	Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan tidak melalui Dinas PUPR namun disampaikan ke Dinas Perkimtan Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
131	BAPPEDA Kab. Pulang Pisau	Peningkatan kualitas rumah warga masyarakat berpenghasilan rendah / pra sejahtera di Kelurahan Pulang Pisau sebanyak 165 unit Rp. 4.125.000.000	Kelurahan Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Lengkapi data dukung: SK Kumuh (update), Proposal, Foto Rumah dan lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Provinsi, usulan dilengkapi dengan Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 0 Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
132	BAPPEDA Kab. Seruyan	Bantuan Bedah Rumah 30 unit Desa Paren Kecamatan	Desa Paren RT.01 / RT. 03, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/ dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH dll perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan kaw. kumuh kewenangan provinsi? Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan diverifikasi lebih lanjut untuk perbaikan RTLH yang berada pada kawasan kumuh kewenangan provinsi.Usulan dilengkapi dengan SK Kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
133	BAPPEDA Kab. Seruyan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bedah Rumah Desa Terawan sebanyak 25 unit	Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/ dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH dll. perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan kewenangan provinsi? Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan diverifikasi lebih lanjut untuk perbaikan RTLH yang berada pada kawasan kumuh kewenangan provinsi.Usulan dilengkapi dengan SK Kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
134	BAPPEDA Kab. Seruyan	Usulan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bedah Rumah Desa Tabiku sebanyak 15 unit	Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, sudah dilakukan input pada aplikasi e-RTLH, perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan kewenangan provinsi (10-15 Ha) Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan diverifikasi lebih lanjut untuk perbaikan RTLH yang berada pada kawasan kumuh kewenangan provinsi.Usulan dilengkapi dengan SK Kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
135	BAPPEDA Kab. Seruyan	Usulan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bedah Rumah Desa Lanpasa sebanyak 22 unit	Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung diantaranya: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, sudah dilakukan input pada aplikasi e-RTLH, perlu konfirmasi apakah lokasi usulan merupakan kewenangan provinsi? Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan diverifikasi lebih lanjut untuk perbaikan RTLH yang berada pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Usulan dilengkapi dengan SK Kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
136	BAPPEDA Kab. Seruyan	Usulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bedah Rumah Desa Panimba Raya sebanyak 11 unit	Desa Panimba Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung diantaranya: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto tampak samping dan depan, sudah dilakukan input pada aplikasi e-RTLH dll Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan diverifikasi lebih lanjut untuk perbaikan RTLH yang berada pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Usulan dilengkapi dengan SK Kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
137	BAPPEDA Kab. Seruyan	Usulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Bedah Rumah Tangga Miskin Desa Tanjung Rangas II sebanyak 15 unit	Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung diantaranya: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, sudah dilakukan input pada aplikasi e-RTLH dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan diverifikasi lebih lanjut untuk perbaikan RTLH yang berada pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Usulan dilengkapi dengan SK Kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, Data BNBA, Input pada Aplikasi e-RTLH, Foto Rumah, Koordinat, dll. Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
138	BAPPEDA Kab. Seruyan	Usulan Semenisasi Jalan Dalam Desa Riam Batang sepanjang 4m x 200m	Desa Riam batang, Kecamatan Seruyan Hulu, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung diantaranya: Proposal, RAB, Foto kondisi eksisting, titik koordinat dll. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
139	BAPPEDA Kab. Seruyan	Usulan Semenisasi Jalan Poros Tumbang Darap Desa Tumbang Darap sepanjang 1000mx4m	Desa Tumbang Darap, Kecamatan Seruyan Hulu, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi data dan dokumen pendukung diantaranya: Proposal, RAB, Foto, Titik Koordinat, dll Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
140	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Bumi Pertiwi (100 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
141	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Damang Rundun Residence I (150 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
142	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Damang Rundun Residence I (250 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
143	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Indah I (100 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
144	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Indah IV (100 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
145	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Indah V (100 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
146	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Graha Permata Regency I (300 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
147	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Graha Permata Regency II (100 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
148	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Lingkungan Graha Permata Regency III (200 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
149	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Griya Bumi Pertiwi (580 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
150	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Damung Rundun Residence I (200 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
151	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Damung Rundun Residence II (500 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
152	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Griya Indah I (150 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
153	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Griya Indah III (460 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
154	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Griya Indah IV (200 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
155	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Griya Indah V (500 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
156	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Graha Permata Regency I (600 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
157	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Graha Permata Regency II (200 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
158	BAPPEDA Kab. Sukamara	Pembuatan Drainase Perumahan Graha Permata Regency III (400 M)	Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
159	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan Pelita Desa Sungai Cabang Barat (2.376 m2)	Desa Sungai Cabang Barat Kec. Paantai Lunci Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung lainnya Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
160	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan RT. 1 Desa Sungai Pasir (8.806 m2)	Desa Sungai Pasir Kec. Paantai Lunci Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung lainnya Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
161	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan RT. 2 Desa Sungai Cabang Barat ke Arah Desa Sungai Tabuk (8.880 m2)	Desa Sungai Cabang Barat Kec. Paantai Lunci Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung lainnya Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
162	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan RT. 2 Desa Sungai Tabuk (7.585 m2)	Desa Sungai Tabuk Kec. Paantai Lunci Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung lainnya Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
163	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan RT. 2 ke RT 3 Desa Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung lainnya Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
164	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan RT. 3 ke RT 1 Desa Sungai Cabang Barat (5.377 m2)	Desa Sungai Cabang Barat Kec. Paantai Lunci Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
165	BAPPEDA Kab. Sukamara	Peningkatan Jalan RT. 7 ke RT 6 Desa Sungai Cabang Barat (2.749 m2)	Desa Sungai Cabang Barat Kec. Paantai Lunci Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dilengkapi data dan dokumen pendukung Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan diterima dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi. Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
166	BAPPEDA Kota Palangkaraya	Peningkatan jalan lingkungan dan drainase pemukiman Sabrina G.Obos XIV Palangka Raya ukuran sepanjang 510 meter	Sabrina G.Obos XIV, RT.015 RW.006, Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi data dan dokumen pendukung lainnya, antara lain Proposal, RAB, titik koordinat dll Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut serta memperhatikan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan daerah Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
167	BAPPEDA Kota Palangkaraya	Perbaiki jalan dan pengaspalan	Jalan Bukit Keminting 16 RT.03 RW.22 Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dengan catatan agar dapat dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung diantaranya: Proposal, RAB, Foto, dan lain-lain Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon dilengkapi dengan data dukung dapat berupa foto lokasi, koordinat, proposal, rencana pagu selain itu tetap memperhatikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0
168	ALEXIUS ESLITER	Bedah Rumah Untuk Rumah Tangga Tidak Mampu, sebesar Rp.300.000.000	Desa Sungai Ubar Mandiiri, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
169	ALEXIUS ESLITER	Bedah Rumah Bagi Masyarakat Tidak Mampu, sebesar Rp.300.000.000	Desa Sungai Ubar Mandiiri, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kaw. Kumuh kewenangan provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
170	BRYAN ISKANDAR, SE	program bedah rumah untuk warga kecamatan arut selatan kabupaten kotawaringin barat sebesar Rp. 500.000.000,-	ARUT SELATAN, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH, perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kaw.Kumuh kewenangan provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 500000000 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
171	BRYAN ISKANDAR, SE	program bedah rumah untuk warga kecamatan KUMAI kabupaten kotawaringin barat sebesar Rp.500.000.000,-	KUMAI, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH, perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kaw. Kumuh kewenangan provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 500000000 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
172	BRYAN ISKANDAR, SE	program bedah rumah untuk warga kecamatan Pangkalan Lada kabupaten kotawaringin barat sebesar Rp.500.000.000,-	Pangkala Lada, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kaw. Kumuh kewenangan provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 500000000 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
173	BRYAN ISKANDAR, SE	program bedah rumah untuk warga kecamatan arut utara kabupaten kotawaringin barat sebesar Rp.500.000.000,-	Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH, perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kaw. Kumuh kewenangan provinsi? Koefisien : 500000000 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
174	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Pembangunan Ruas Jalan Buluh Merindu Induk sepanjang 500 meter, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00	Jalan Buluh Merindu, Kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 500 meter Anggaran : 0
175	Dra. KUWU SENILAWATI	Optimalisasi Pengaringan Jalan Danau Sari, sebagai pusat saluran pembuangan/dranase dari beberapa kawasan, seperti: kawasan Jalan Tjilik Riwut, Jalan Mahir Mahar, Jalan Hiu Putih dan Jalan Rajawali. Usulan sebesar Rp.1.000.000.000	Jalan Danau Sari, Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-Foto dll. Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
176	Dra. KUWU SENILAWATI	Peningkatan Jalan Poros Kanarakan - Tangkiling, berupa penimbunan dan pengerasan sepanjang 13 kilometer.	Kanarakan, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu., Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
177	Dra. KUWU SENILAWATI	Pengaspalan jalan Manyar Raya, Manyar 1, s/d. Manyar 5, Komplek Bumi Palangka 2 sepanjang total 1 kilometer.	Jalan Manyar, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya., Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 paket Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
178	Dra. KUWU SENILAWATI	Usulan Pengaspalan Jalan Ulang di Jl. Danau Indah Induk dan Jl. Danau Indah II dan III.	Jalan Danau Indah Induk, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 500 meter Anggaran : 0
179	Dra. KUWU SENILAWATI	Usulan Drainase di Jalan Danau Induk Ujung.	Jalan Danau Induk, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 1.5 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1.5 meter Anggaran : 0
180	Drs. DUWEL RAWING	Memerlukan upaya untuk merelokasi/memindahk an rumah penduduk yang menjadi korban langganan banjir beberapa kali dalam satu tahun dengan perkiraan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00	Pahandut dan Jekan Raya, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Dapat diproses lebih lanjut jika lokasi banjir merupakan kawasan kumuh yang merupakan kewenangan provinsi dan tersedia lahan lokasi relokasi. Koefisien : 0 paket Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
181	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	Bedah rumah warga masyarakat Desa Humbang Raya, sebesar Rp.2.400.000.000	Desa Humbang Raya, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 40 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 unit Anggaran : 0
182	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	PERBAIKKAN JALAN GARUDA IV KECAMATAN JEKAN RAYA, PALANGKA RAYA	JALAN GAURDA IV SAMPAI V KOTA PALANGKA RAYA, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 300000000 Rupiah Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 300000000 Rupiah Anggaran : 0
183	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	PEMBANGUNAN JALAN VETERAN INDUK, KOTA PALANGKA RAYA	JALAN VETERAN INDUK, KELURAHAN PANARUNG, KECAMATAN PAHANDUT, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 250000000 Rupiah Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 250000000 Rupiah Anggaran : 0
184	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	SEMENISASI PERUMAHAN PEMUKIMAN PENDUDUK JALAN KALIMANTAN RT.01/RW.IV PALANGKA RAYA SENILAI Rp. 800.000.000	PERMUKIMAN PENDUDUK JALAN KALIMANTAN RT.01/RW.IV KOTA PALANGKA RAYA, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 800000000 Rupiah Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 800000000 Rupiah Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
185	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	BEDAH RUMAH PENDUDUK (10 UNIT RUMAH) WARGA JALAN KALIMANTAN RT.01/RW.IV KOTA PALANGKA RAYA 75.000.000 X 10 UNIT RUMAH = SENILAI Rp. 750.000.000	WARGA MASYARAKAT JALAN KALIMANTAN RT.01/RW.IV KELURAHAN PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Walikota, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH, perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kaw. Kumuh kewenangan provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 750000000 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
186	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	PERBAIKAN/SEMENISAS I JALAN PERUMAHAN/PERMUKI MAN PENDUDUK DI JALAN ANGGUR RT.01/RW. XVII KOTA PALANGKA RAYA SENILAI Rp. 800.000.000	PEMUKIMAN JALAN ANGGUR RT.01/RW. XVII KOTA PALANGKA RAYA, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 800000000 Rupiah Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 800000000 Rupiah Anggaran : 0
187	H. MARUADI, SH., S.Sos	Cor Beton jalan Lingkungan Gereja Katolik Kel. Pulang Pisau	Komplek Gereja Katolik Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 750 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 750 meter Anggaran : 0
188	H. MARUADI, SH., S.Sos	pengaspalan jalan perintis desa pilang	jl perintis desa pilang, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 600 m Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 600 m Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
189	H. MARUADI, SH., S.Sos	Pembangunan Jembatan penyeberangan di RT 10 kel selat utara	RT 10 kelurahan selat utara, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-Foto dll. Koefisien : 1 bh Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 bh Anggaran : 0
190	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan rumah layak huni masyarakat tidak mampu desa mentaren I	desa mentaren I, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH, perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan kewenangan provinsi? Koefisien : 12 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 unit Anggaran : 0
191	H. PURMAN JAYA, S.Sos	Peningkatan Jalan Munardi	Jalan Munardi, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB dll. Koefisien : 2000 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 2000 meter Anggaran : 0
192	H. PURMAN JAYA, S.Sos	Peningkatan Jalan H. Noradin	Jalan H. Noradin, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll Koefisien : 800 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 800 meter Anggaran : 0
193	H. PURMAN JAYA, S.Sos	Lanjutan Jalan Pesantren Darul Salam	Jalan Pesantren Darul Salam, Kab. Barito Utara	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1000 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1000 meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
194	H. PURMAN JAYA, S.Sos	Permohonan aspal jln desa bukit batu	jalan desa bukit batu, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung lainnya. Koefisien : 600 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 600 meter Anggaran : 0
195	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pipit dan sekitarnya	Jl. Pipit dan sekitarnya RW 01 SP 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
196	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Camara dan sekitarnya	Jalan Camara RW 01/02 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
197	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Parkit dan sekitarnya	Jl. Parkit RW 02 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
198	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Seriti dan sekitarnya	Jl. Seriti dan sekitarnya RW 01/02 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
199	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Perenjak dan sekitarnya	Jl. Perenjak RW. 05 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
200	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Elang dan sekitarnya	Jl. Elang dan sekitarnya RW 05 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
201	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nuri dan sekitarnya	Jl. Nuri RW 05 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
202	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Beringin dan sekitarnya	Jl. Beringin dan sekitarnya W 03 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
203	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Perkutut dan sekitarnya	Jl. Perkutut RW 05 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
204	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Podang dan sekitarnya	Jl. Podang RW 05 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
205	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kutilang dan sekitarnya	Jl. Kutilang RW 05 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
206	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jalak dan sekitarnya	Jl. Jalak RW 04 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 milyar Anggaran : 0
207	HERI SANTOSO, ST	peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Merpati dan sekitarnya	Jl. Merpati RW 06 Ds Lada mandala jaya Sp. 2, Kab. Kotawaringin Barat	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
208	Hj. RUSITA IRMA, S.Pi	Permintaan Bedah Rumah bagi warga kurang mampu	Desa Bahaur Tengah, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
209	Ir. ARTABAN, MH	Pengaspalan Jalan Poros desa bandar Agung	desa bandar Agung, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung lainnya. Koefisien : 3800 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 3800 meter Anggaran : 0
210	Ir. ARTABAN, MH	Perbaiki Box Culvert Poros desa Bandar Agung	Jl amarta no II, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung lainnya Koefisien : 3 bh Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 3 bh Anggaran : 0
211	Ir. ARTABAN, MH	pembangunan drainase	RT 8 RW 2dan RT 12 RW 4, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut pada Musrenbang Provinsi Koefisien : 440 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 440 meter Anggaran : 0
212	Ir. ARTABAN, MH	Penyiringan dan Penimbunan Jalan Kutung Mistur	Jl Tjilik Riwut km 48, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll Koefisien : 1200 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1200 meter Anggaran : 0
213	Ir. ARTABAN, MH	pembangunan Drainase gang pasar di RT 05	Gang Pasar RT 5, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 600 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 600 meter Anggaran : 0
214	Ir. ARTABAN, MH	Pengaspalan jalan Dinan	Jalan Dinan, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 500 meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
215	Ir. ARTABAN, MH	Permohonan Pengaspalan Jalan SD	Jalan SD, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 600 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 600 meter Anggaran : 0
216	Ir. ARTABAN, MH	Pembuatan Jembatan pada Jalan Usaha Tani	karang tunggal, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut pada Musrenbang Provinsi Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
217	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan Jalan desa	desa karang tunggal, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan, untuk dibahas lebih lanjut. Koefisien : 2000 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 2000 meter Anggaran : 0
218	Ir. ARTABAN, MH	Pengerasan Jalan Padat Karya desa Keruing	desa keruing, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 1800 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1800 meter Anggaran : 0
219	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan Jalan Denok Kota Palangka Raya	Jalan Denok, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 600 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 600 meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
220	Ir. ARTABAN, MH	pengerasan jalan agregat b	Jl Rajawali no 1, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dll. Koefisien : 800 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 800 meter Anggaran : 0
221	Ir. ARTABAN, MH	Pengaspalan Jalan Lintas Desa	Jl Rajawali No 1, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverivikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1500 meter Anggaran : 0
222	Ir. YULILIS	Peningkatan jalan G. Obos XX dan jalan G. Obos XXV palangka raya.	Peningkatan jalan G. Obos XX dan jalan G. Obos XXV, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2, untuk melihat kondisi lokasi eksisting Koefisien : 1500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1500 meter Anggaran : 0
223	JAINUDIN KARIM, SE	Hibah Dana 200.000.000 Juta Untuk Usulan Perbailan Jalan Perkapen Desa Handil Sohor	Desa Handil Sohor, Kab. Seruyan	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Perlu diperjelas apakah Urusannya sudah sesuai? Urusan Pertanahan atau urusan Perumahan dan Kaw. Permukiman Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
224	JAINUDIN KARIM, SE	Hibah Dana 200.000.000 Juta Untuk Kegiatan Perbaikan Jalan Wengga 10 Kelurahan Baamang Barat	Jalan Wengga 10, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapai dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
225	JAINUDIN KARIM, SE	Usulan Hibah Dana 200.000.000 Juta Untuk Perbaikan Jalan Damai Desa Cempaka Mulia Timur	Desa Cempaka Mulia Timur, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
226	JAINUDIN KARIM, SE	Usulan Pagu Anggaran 200.000.000 Juta Untuk Perbaikan Perbaikan Jalan Madiun Ngawi Sawah, Kab. Kotim	Kelurahan Sawahan, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
227	JAINUDIN KARIM, SE	Usulan Pagu dana Hibah 200.000.000 Juta Untuk Perbaikan Jalan Kembali 4	Kelurahan Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
228	JAINUDIN KARIM, SE	Usulan Dana Hibah 200.000.000 Juta Untuk Perbaikan/Peningkatan Jalan TABULIHAN Kelompok RAHMAD ABADI	Jalan TABULIHAN (Dari Arah Jln. Cilik Riwut Menuju Sungai Mentaya), Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
229	JAINUDIN KARIM, SE	Usulan Anggaran 200.000.000 Juta Untuk Perbaikan/Peningkan Jalan Teratai 5 Jalur 5 Ketapang	Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverivikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
230	JAINUDIN KARIM, SE	Guna Membantu Keluhan warga diusulkan dana Hibah 200.000.000 Juta Untuk Perbaikan/Peningkatan Jln. TVRI di Kelurahan Ketapang	Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0
231	JAINUDIN KARIM, SE	Dalam Rangka Membantu Usulan Warga Tentang Lanjutan Perbaikan/Peningkatan Jalan Rambutan untuk dianggarkan bantuan dana perbaikan jalan senilai 200.000.000 Juta.	Kelurahan ketapang, Kab. Kotawaringin Timur	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto dll. Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan mohon untuk dilengkapi dengan data dukung dan akan diverifikasi serta dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
232	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rumah Bedah/Pembangunan Rumah Pelangi di RT.10 Kelurahan Tumbang Lahung	Kel. Tumbang Lahung, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e- RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
233	SISWANDI	Bantuan rehab Rumah masyarakat yang tidak mampu di 4 (Empat) Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur	Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 50 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
234	SISWANDI	Bantuan Rehab Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni	Kabupaten Murung Raya, Kab. Murung Raya	Rekomendasi : Usulan diteruskan dgn catatan agar dilengkapi data/dokumen pendukung al.: Data BNBA di Kaw. Kumuh sesuai SK Bupati, Foto2, input pd aplikasi e-RTLH. Perlu dikonfirmasi apakah lokasi usulan merupakan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha)? Koefisien : 500 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
235	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Lanjutan Pengerasan Jalan penghubung desa gandang	jalan lintas Palangkaraya - bahaur RT 24/RW05, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB dll Koefisien : 2400 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 2400 meter Anggaran : 0
236	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Pembangunan Box Culvert Poros Rey 13 dan 16	jl lintas palangkarya- bahaur RT24/RW05, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB dll Koefisien : 2 bh Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 2 bh Anggaran : 0
237	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Peningkatan jalan lingkungan baru kanamit jaya	Jln. mawar IV RT04/RW01, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB dll Koefisien : 1150 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1150 meter Anggaran : 0

No	Pengusul	Usulan	Alamat	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
238	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Pengaspalan Jalan Lingkungan dengan teknik semenisasi	Pemdes Harapan Baru, Kab. Kapuas	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto2 dllnya Koefisien : 2500 m Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 2500 m Anggaran : 0
239	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Peningkatan Jalan kapuas dan Jalan Doris Sylvanus desa maliku baru	Jalan kapuas dan Jalan Doris Sylvanus desa maliku baru, Kab. Pulang Pisau	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dpt dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, dll. Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang ada Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
240	WIYATNO., S.P	perlunya pentaan dan pembangunan infrastruktur Kampus Universitas Palangka Raya	I. Yos Sudarso, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0
241	WIYATNO., S.P	Rehap Total Perumahan Perwira Polda Kalteng	kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya	Rekomendasi : Usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan agar dilengkapi dengan data/dokumen pendukung al.: Proposal, RAB, Foto-foto dll. Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan akan diverifikasi lebih lanjut Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 Pembangunan infrastruktur pada periode 2020- 2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta Pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Permasalahan secara nasional di lingkup perumahan dan kawasan permukiman adalah pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan akibat pertumbuhan secara alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, keterbatasan lahan merupakan tantangan krusial yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hunian layak dan terjangkau.

Ketidakseimbangan antara supply dan demand lahan menyebabkan tingginya harga lahan. Selain itu, kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak (57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal.

Dibidang pertanahan Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan:

- a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen;
- b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen;
- c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga (Sensus Pertanian BPS, 2013);
- d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.

Permasalahan di kedua bidang diatas menjadi titik awal perumusan strategi dan arah kebijakan selama 5 tahun kedepan melalui fokus pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar.

Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan *on grid* dan *off grid* untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk *multi-purpose* dan irigasi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, *Internet of Things* (IoT) maupun *artificial intelligence* (AI).

Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Melalui Arah Kebijakan dan Strategi Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau, Pemerintah melalui RPJMN berupaya meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Strategi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan *enabling environment*.

Strategi dari sisi permintaan (*demand side*) melalui:

- 1) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan perumahan yang murah, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan dana jaminan sosial/pensiun;
- 2) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan; dan
- 3) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumah secara swadaya.

Strategi dari sisi pasokan (*supply side*) melalui:

- 1) Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dengan sistem transportasi;
- 2) Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui *inclusive urban renewal* dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan;
- 3) Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman;
- 4) Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan; dan
- 5) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR.

Sedangkan strategi dari aspek *enabling environment*, dilakukan melalui:

- 1) Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan;
- 2) Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan;
- 3) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan
- 4) Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Sasaran, Target, dan Indikator

Sasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Sasaran Dan Indikator Pembangunan Infrastruktur

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
	Meningkatnya konektivitas nasional	Indeks Konektivitas Nasional	
	Meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<i>Information and Communication Technologies (ICT) Development Index</i>	
	Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air	Meningkatnya <i>water productivity</i> (GDP/m ³)	
	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga	Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	
	Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	Penyediaan energi nasional (MTOE)	
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%) 2. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) 3. Proporsi rumah tangga yang memiliki kepemilikan tanah tempat tinggal (%) 4. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) (%) 5. Persentase penduduk yang masih mempraktekkan buang air besar sembarangan (%) 6. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%) 7. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) 8. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)* (akses perpipaan) 	
	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Rasio kecelakaan sektor transportasi	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya tampungan air (alami dan infrastruktur) per kapita (m³/kapita) Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi secara modern (%) Meningkatnya luas lahan pertanian non-padi yang beririgasi (Hektare) Menurunnya indeks resiko bencana untuk banjir, longsor, gunung berapi, dan gempa bumi Meningkatnya bauran air baku permukaan untuk air minum (m³/detik) Meningkatnya restorasi infrastruktur alami sumber air (unit) Meningkatnya <i>water productivity index</i> (USD/m³) 	
KP 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	<p>Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan dari 38,30% (2018) menjadi 52,78% (2024)</p> <p>Diukur menggunakan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit) Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit) Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit) Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga) Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/ kota) Jumlah kabupaten/ kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/ kota) 	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru Layak Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim Penyediaan 100.000 Unit Hunian Layak (<i>Major Project</i>)
KP 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya akses air minum layak dan aman <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya 75 % akses air minum layak (termasuk 30 % akses perpipaan) Terpenuhinya 100 % PDAM dengan kinerja sehat Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya 90 % akses sanitasi layak (termasuk 20 % aman) Terpenuhinya 0 % BABS Terpenuhinya akses persampahan yang dikelola dengan baik Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota dan permukiman (SR) Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S (KK) Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK) Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R/ TPST (KK) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan lumpur tinja (FSM) (Kab/Kota) Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak (SR) (akses JP susenas) Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak (akses BJP Susenas) Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (akses air minum aman susenas dalam proses persiapan) Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%) Jumlah persentase angka BABS (%) 	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman (<i>Major Project</i>) Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (<i>Major Project</i>) Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (<i>Major Project</i>) Pembangunan sistem pengelolaan sampah domestik

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tampungan air (alami dan infrastruktur) per kapita (m³/kapita) 2. Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi secara modern (%) 3. Meningkatnya luas lahan pertanian non-padi yang beririgasi (Hektare) 4. Menurunnya indeks resiko bencana untuk banjir, longsor, gunung berapi, dan gempa bumi 5. Meningkatnya bauran air baku permukaan untuk air minum (m³/detik) 6. Meningkatnya restorasi infrastruktur alami sumber air (unit) 7. Meningkatnya <i>water productivity index</i> (USD/m³) 	
KP 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	<p>Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan dari 38,30% (2018) menjadi 52,78% (2024)</p> <p>Diukur menggunakan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit) b. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit) c. Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit) d. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga) e. Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/ kota) f. Jumlah kabupaten/ kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/ kota) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Penyediaan Hunian Baru Layak 2. Fasilitas Pembiayaan Perumahan 3. Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah 4. Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman 5. Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim 6. Penyediaan 100.000 Unit Hunian Layak (Major Project)

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kuncikeberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi pemerintah daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah tercapainya optimalisasi pelayanan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang intergratif dan berdaya guna sesuai lingkup kewenangannya.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai melalui adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya SPM bidang perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan kualitas PSU pada lingkungan permukiman;
- c. Pengelolaan kawasan kumuh lingkup kewenangan provinsi (10-15 Ha);
- d. Pelaksanaan layanan urusan pertanahan sesuai kewenangan provinsi;

Tujuan dan sasaran tersebut akan diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2023, Renja Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan Renstra - PD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian SPM bidang perumahan sesuai kewenangan;
2. Penyelenggaraan layanan urusan bidang permukiman sesuai kewenangan;
3. Penyelenggaraan layanan urusan bidang pertanahan sesuai kewenangan;
4. Kesiambungan dengan program dan kegiatan tahun sebelumnya (N-1).
5. Penyelarasan dengan kebijakan umum pemerintah provinsi kalimantan tengah dan kebijakan nasional;
6. Kondisi keuangan daerah;

Pada tahun 2023, Renja-PD Disperkimtan terdiri dari 8 Program 16 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, dengan total kebutuhan pagu pada tahun 2023 sebesar Rp.126.351.828.923 dan Rp. 138.461.141.382 pada tahun N+1 (2024) dengan asumsi anggaran berdasarkan Renstra – PD 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terbagi dalam kategori sebagai berikut:

1. Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, sebanyak 1 Program, 7 Kegiatan dan 23 sub Kegiatan
2. Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan

- Kawasan Permukiman, sebanyak 4 Program, 6 Kegiatan dan 15 sub Kegiatan
3. Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan, sebanyak 3 Program, 3 Kegiatan dan 4 sub Kegiatan.

Berikut rincian Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					125.565.291.413		137.788.993.554				
1	0401				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.700.037.587		15.070.041.346				
1	0401	1,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					260.000.000		286.000.000				
1	0401	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	165.000.000
1	0401	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	66.000.000
1	0401	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	0	0	1,0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.483.353.136			6.031.688.450				
1	041	1,02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	39 Orang/Bulan	1 tahun	5.448.353.136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	5.993.188.450
1	041	1,02	07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	38.500.000
1	0	0	1,0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					230.000.000			253.000.000				
1	041	1,03	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	220.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catat an Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
1 0 4 0 1 1,0 3 0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Lapora n	1 tahun	30.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintaha n bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	33.000.000
1 0 4 0 1 1,0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							190.000.000					209.000.000	
1 0 4 0 1 1,0 5 0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokum en	1 tahun	20.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintaha n bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	22.000.000
1 0 4 0 1 1,0 5 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokum en	1 tahun	20.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintaha n bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	22.000.000
1 0 4 0 1 1,0 5 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Orang	1 tahun	150.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintaha n bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	165.000.000
1 0 4 0 1 1,0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.948.184.4 51					2.143.002.8 96	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
1 0 4 0 1 1,0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Paket	1 tahun	60.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintah an bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	66.000.000
1 0 4 0 1 1,0 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Paket	1 tahun	997.759.633	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintah an bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	1.097.535.59 6
1 0 4 0 1 1,0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Paket	1 tahun	70.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintah an bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	77.000.000
1 0 4 0 1 1,0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokum en	1 tahun	100.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintah an bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	110.000.000
1 0 4 0 1 1,0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata	1 tahun	1 Lapora n	1 tahun	620.424.818	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan	1 tahun	682.467.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		bidang PKP dan Pertanahan		daerah selama 1 tahun	n, Semua Kelurahan							pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan			
1	0411061	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	110.000.000
1	041108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.083.000.000			4.491.300.000			
1	0411081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	11.000.000
1	0411082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	675.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	742.500.000
1	0411084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	3.398.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang	1 tahun	3.737.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
												PKP dan Pertanahan				
1	041	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.505.500.000			1.656.050.000				
1	041	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	5 Unit	1 tahun	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	330.000.000
1	041	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	5 Unit	1 tahun	455.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	501.050.000
1	041	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Unit	1 tahun	550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	1 tahun	605.000.000
1	041	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Unit	1 tahun	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang	1 tahun	220.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
													PKP dan Pertanahan				
1	042				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					760.140.000					503.327.000		
1	042	1,0	1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					526.355.000					246.163.500		
1	042	1,0	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 keg	223.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100 %	246.163.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1.04.2.1.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 keg	163.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100 %	180.163.500
1.04.2.1.03	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 keg	138.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang	100 %	152.663.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
1																
1			1,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					233.785.000					257.163.500	
1	042	1,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit Rumah	1 Keg	233.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100 %	257.163.500
1	043			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					5.871.271.056					6.458.398.162		
1	043	1,01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					1.490.483.856					1.639.532.242		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	043102	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan 125 Unit	1 Laporan	4 Keg	173.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	2 Kawasan 125 Unit	191.163.500
1	043103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Peremukuman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Hasil Koordi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremukuman Kembali Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan 125 Unit	1 Laporan	4 Keg	78.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	2 Kawasan 125 Unit	86.663.500
1	043108	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevisi/ Terlegalisasi	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan 125 Unit	1 Dokumen	4 Keg	852.128.856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	2 Kawasan 125 Unit	937.341.742

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
100109	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan 125 Unit	1 Laporan	4 Keg	385.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	2 Kawasan 125 Unit	424.363.500
100109	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							4.380.787.200			4.818.865.920			
100102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Hasil Koordi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tida Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai den Bawah 15 (Lima Belas) Ha	nasi n Jumlah Kegiatan upkeimnningkatan Kualitas dKanwasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (kSleapyualkuh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima LBuealsas) Ha gan di	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan 125 Unit	1 Laporan	3 Keg	123.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	2 Kawasan 125 Unit	136.163.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan 125 Unit	125 Unit Rumah	3 Keg	3.091.828.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	2 Kawasan 125 Unit	3.401.011.240
1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan 125 Unit	2 Ha	3 Keg	1.165.173.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	2 Kawasan 125 Unit	1.281.691.180
1	0	0		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					105.060.057				115.566.063	
	4	5							.770				.547	
1	0	0	1,0	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					105.060.057				115.566.063	
	4	5	1						.770				.547	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Keg	3.949.177.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada	100 %	4.344.094.920

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
1	0405102	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Lokasi	3 Keg	100.610.880.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	100 %	110.671.968.627			
1	0405103	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Keg	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	100 %	550.000.000			
1	0406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								173.785.000			191.163.500					
1	04061	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah								173.785.000			191.163.500					
1	04061	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang dan Badan Hukum yang melaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Keg	173.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi	100 %	191.163.500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	dengan Kualifikasi Menengah		Dengan Kualifikasi Menengah	Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan PSU tingkat kemampuan Menengah												
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					786.537.510				672.147.828			
2	1004			PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN					216.446.900				238.091.590			
2	1004	1,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					216.446.900				238.091.590			
2	1004	1,01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	1 Keg	216.446.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	50 %	238.091.590
2	1006			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					394.596.580				434.056.238			
2	1006	1,01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					394.596.580				434.056.238			
2	1006	1,01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Ha	1 Dokumen	3 Keg	190.474.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	3000 Ha	209.522.093

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catat an Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Targe t			
				ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
2	1 0 6	1,0 1	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Ha	1 Berita Acara	3 Keg	204.121.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	3000 Ha	224.534.145
2	1 0 6			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								175.494.030				
2	1 0 0	1 1 1	1,0 1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								175.494.030				
2	1 0 0	1 1 1	1,0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dok	1 Laporan	1 Keg	175.494.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Dok	193.043.433
TOTAL											126.351.828 .923			138.461.141 .382		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyusun rencana kerja dan kerangka pendanaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 didasari dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kewajiban melaksanakan SPM Bidang Perumahan;
2. Dukungan strategis terhadap kesinambungan pencapaian visi dan misi RPJMD

Sebagai bentuk konsistensi terhadap kesinambungan layanan pembangunan maka Disperkimtan tetap berupaya untuk fokus pada dalam misi pengelolaan infrastruktur, meskipun dalam kedalaman strategi, arah dan kebijakannya tidak secara spesifik memberikan arahan bagi pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, namun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tujuan pelayanan dasar antara lain sebagaiberikut:

- a. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.
 - b. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
 - c. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
 - d. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
 - e. Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
3. Dukungan strategis terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mewujudkan Target SDGs, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Pencapaian target SDGs telah ditetapkan melalui Perpres nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan PP nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Pengentasan/penurunan angka kemiskinan

Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk memberikan sumbangsih dalam upaya pencapaian target Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu indikator kemiskinan adalah Rumah Tidak Layak (RLH).

Melalui program-program bidang perumahan, diupayakan sejumlah kegiatan yang memberikan bantuan stimulan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memperbaiki kualitas huniannya sehingga dapat keluar dari kelompok masyarakat miskin. Hal ini tentunya dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dikelola Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 didistribusikan ke Bidang Teknis dan Sekretariat dengan perincian sebagaimana tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah
										Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0 4					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			125.565.291.413							
1	0 4	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.700.037.587					Ya Ya		
1	0 4	0 1	1,0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			260.000.000					Ya Ya		
1	0 4	0 1	1,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0 4	0 1	1,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0 4	0 1	1,0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0 4	0 1	1,0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.483.353.136					Ya Ya		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah
										Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	39 Orang/ Bulan	1 tahun	5.448.353.136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							230.000.000		Ya	Ya	
1	0	0	1,0	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							190.000.000		Ya	Ya	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah
										Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	0	0	1,0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Orang	1 tahun	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.948.184.451		Ya	Ya	
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Paket	1 tahun	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Paket	1 tahun	997.759.633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Paket	1 tahun	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah
										Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	620.424.818	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.083.000.000		Ya	Ya	
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	675.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
									Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	3.398.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4	1	8	4															
1	0	0	1,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.505.500.000		Ya	Ya			
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	5 Unit	1 tahun	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4	1	9	1															
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	5 Unit	1 tahun	455.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4	1	9	2															
1	0	0	1,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Unit	1 tahun	550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4	1	9	9															
1	0	0	1,0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Unit	1 tahun	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4	1	9	0															
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							760.140.000		Ya	Ya			
1	0	0	1,0		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							526.355.000		Ya	Ya			
4	2	2	1															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
									Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	0	0	1,0	0	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 keg	223.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 keg	163.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 keg	138.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							233.785.000		Ya	Ya	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah
										Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	0	0	1,0	0	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit Rumah	1 Keg	233.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							5.871.271.056		Ya	Ya	
1	0	0	1,0		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							1.490.483.856		Ya	Ya	
1	0	0	1,0	0	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan 85 Unit	1 Laporan	4 Keg	173.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Hasil Koordi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan 85 Unit	1 Laporan	4 Keg	78.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah
										Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	04	03	101	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan 85 Unit	1 Dokumen	4 Keg	852.128.856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	04	03	101	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan 85 Unit	1 Laporan	4 Keg	385.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	04	03	102		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							4.380.787.200		Ya	Ya	
1	04	03	102	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kumuh Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan 10 (Sepuluh) Ha sampai den Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan 85 Unit	1 Laporan	3 Keg	123.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
									Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	0	0	1,0	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan 85 Unit	85 Unit Rumah	3 Keg	3.091.828.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Jumlah Perbaikan RTLH	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan 85 Unit	1 Ha	3 Keg	1.165.173.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							105.060.057.770		Ya	Ya	
1	0	0	1,0		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman							105.060.057.770		Ya	Ya	
1	0	0	1,0	0	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Keg	3.949.177.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	0	0	1,0	0	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Lokasi	3 Keg	100.610.880.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
										Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	0	0	1,0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Keg	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN							173.785.000		Ya	Ya				
1	0	0	1,0		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah							173.785.000		Ya	Ya				
1	0	0	1,0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang dan Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan PSU tingkat kemampuan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Keg	173.785.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											786.537.510			
2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN											216.446.900		Ya	Ya
2	1	0	1,0		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											216.446.900		Ya	Ya
2	1	0	1,0	0	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	1 Keg	216.446.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prioritas			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
									Prog.	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
2	1	0			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							394.596.580		Ya	Ya	
2	1	0	1,0		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							394.596.580		Ya	Ya	
2	1	0	1,0	0	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Ha	1 Dokumen	3 Keg	190.474.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	1	0	1,0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Ha	1 Berita Acara	3 Keg	204.121.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	1	0			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							175.494.030		Ya	Ya	
2	1	1	1,0		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi							175.494.030		Ya	Ya	
2	1	1	1,0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dok	1 Laporan	1 Keg	175.494.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
												126.351.828.923				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja-PD merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan RKA-SKPD dan pada saatnya nanti akan menjadi dokumen anggaran berupa DPA-SKPD yang operasional. Renja berfungsi pula sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik .

Sebagai akhir kata, kami pimpinan beserta segenap aparatur Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan agar Renja-PD Tahun 2023 ini menjadi kerangka acuan untuk mewujudkan pembangunan dan layanan bidang PKP dan pertanahan yang lebih baik yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.



ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19740109 200212 1 002



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023